



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kemenpar RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 1 September 2016.
Pukul	: 15.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan RKA K/L TA 2017; 2. Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK; dan 3. Lain-lain
Hadir	: 34 orang dari 51 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menpar beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.10 WIB oleh Ir. H.A. R. Sutan Adil Hendra, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpar RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. RKA K/L TA 2017

1. Sesuai surat Menkeu Nomor: S-635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 Kemenpar RI menyampaikan usulan pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2017 sebesar Rp 3.823.958.059.000,- (tiga triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk:

UNIT UTAMA	Program	Pagu Anggaran RAPBN TA 2017
SEKRETARIAT KEMENTERIAN	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	319.588.143.000
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA	Pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara	2.071.866.940.000
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA	Pengembangan pemasaran pariwisata nusantara	421.185.545.000
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	Pengembangan destinasi dan industri pariwisata	247.317.431.000
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Pengembangan kelembagaan kepariwisataan	764.000.000.000
Total		3.823.958.059.000

2. Pagu anggaran RAPBN TA 2017 Kemenpar RI sebesar **Rp 3,824 triliun** diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) fungsi yaitu (i) fungsi pariwisata sebesar Rp 3,160 triliun dan (ii) fungsi pendidikan sebesar Rp 664,0 miliar.
3. Terhadap usulan program dan anggaran tersebut (poin A1 dan A2), Komisi X DPR RI belum menyetujui karena masih memerlukan pendalaman lebih lanjut utamanya program/kegiatan yang harus dianggarkan sebagai amanat UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
4. Dalam rangka pendalaman sebagaimana dimaksud pada poin A.3, Komisi X DPR RI mendesak Kemenpar RI untuk:
 - a. Menajamkan kembali (*re-focusing*) program prioritas yang harus dianggarkan pada RAPBN TA 2017, indikator dan target kinerja merujuk pada realisasi kinerja satu atau dua tahun terakhir.
 - b. Penetapan 10 destinasi wisata baru sebagai destinasi wisata prioritas harus didukung sumber daya kepariwisataan yang berkualitas, dukungan infrastruktur, dukungan fasilitas peningkatan akses transportasi, dan dukungan akses informasi serta komunikasi.

5. Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk mengelaborasi jawaban dan penjelasan atas pertanyaan dan tanggapan/saran dari Anggota secara tertulis dengan memperhatikan poin A.3 dan A.4.
6. Komisi X DPR RI dan Menpar RI sepakat akan mengadakan Raker kembali yang direncanakan antara tanggal 22 s.d. 29 September 2016 dengan agenda antara lain: (i) pendalaman jawaban tertulis (poin A.5), (ii) mengusulkan kembali program/kegiatan dan anggaran dengan memperhatikan poin A.3. dan A.4, dan (iii) penyesuaian RKA-K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

B. Program yang akan didanai oleh DAK

1. Atas usulan daerah, Kemenpar RI menyampaikan usulan program yang akan didanai oleh DAK pada RAPBN TA 2017 sebesar Rp 5.413.284.166.634,00 (Lima triliun empat ratus tiga belas miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
2. Terhadap usulan DAK tersebut, Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI agar mengkaji ulang secara komprehensif atas kapasitas fiskal dan rasionalitas usulan yang dimaksud dengan memperhatikan kebijakan kepariwisataan di Kemenpar RI.

III. PENUTUP

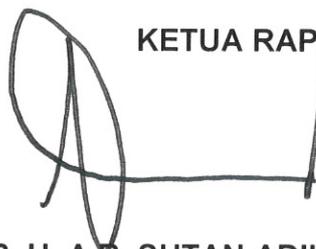
Rapat ditutup pada pukul **17.40** WIB

MENTERI PARIWISATA RI



ARIEF YAHYA

KETUA RAPAT,



IR. H. A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.